

**Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah  
Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**RATU FAISA**

**NIM:10400111047**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratu Faisa  
NIM : 10400111047  
Tempat/tgl. Lahir : Ujung Pandang, 09 Juli 1994  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Takalar  
Judul : Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juni 2015

Penyusun,

**Ratu Faisa**  
**NIM: 10400111047**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Ratu Faisa, NIM: 10400111047, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk disidangkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 24 Juni 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dra. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D.  
NIP.19641231 199203 2 015

  
Dr. Azman., M. Ag  
NIP.19660407 199403 1 003



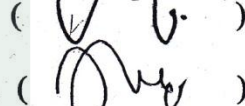


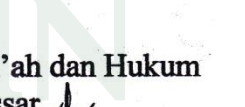
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)”, yang disusun oleh Ratu Faiza, NIM 10400111047, mahasiswi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 31 Juli 2015 M, bertepatan dengan 15 Syawal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 31 Juli 2015 M.  
15 Syawal 1436 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.	(  )
Sekretaris	: Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.Ag.	(  )
Munaqisy I	: Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A.	(  )
Munaqisy II	: Dr. Achmad Musyahid Idrus, S.Ag.,M.Ag.	(  )
Pembimbing I	: Prof. Dra. Hj. St Aisyah Kara, M.A.,Ph.D.	(  )
Pembimbing II	: Dr. Azman, M.Ag.	(  )

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A  
NIP. 19570414 198603 1 003

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Wr.Wb*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat merampungkan skripsi ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia, penyusun kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah memperjuangkan Islam sebagai aturan hidup.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)”** Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat

pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk sugesti, dan motivasi moril maupun materil. Karena itu kemudian, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Sirajuddin** dan Ibunda **Hj. Fatmawati**. Ucapan yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda yang sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti- hentinya. Dan kepada Ibunda tersayang, yang selalu membantu dan menyemangati baik diwaktu kuliah dan diwaktu penyelesaian skripsi ini, dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Dan kepada kakek **Dg Tulung** dan nenek **Sarifa Dg Bollo**, serta adinda **Rostati dan Reski Pujianto** yang telah banyak membantu. Dan tak lupa kepada seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta do'a restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. **Prof. DR. H. Ali Parman, M.A**, selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis.
3. **Dr. Abdillah Mustari, M.Ag**, selaku ketua jurusan dan **Achmad Musyahid, S.Ag., M.Ag.** selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



4. **Prof. Dra. Hj. Siti Aisyah, M.A., Ph.D.** selaku Pembimbing I dan **Dr. Azman, M.Ag** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
6. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada kakanda **Muh. Asfah** yang telah memberikan banyak support dan motivasi kepada saya.
8. Sahabat-sahabat seperjuanganku sekaligus saudari terbaikku **Nurinda Sari, Hilda, Resky Amelia, Nur Santi, Nur Fitriani Azis**, yang telah banyak sekali membantu dari awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.
9. Seluruh mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setiap saat mewarnai hidupku dalam suka dan duka.
10. Sahabat-sahabat tercintaku **Wira Hardiyanti, Mustakima Bakri** dan alumni SMAN 1 Takalar, dan alumni SMP Neg. 3 Takalar yang selalu mendoakan, menghibur dan memberikan support dikala penulis lelah dalam menyusun skripsi..
11. Terima Kasih kepada teman- teman KKN UIN Angkatan 50 Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kab.Gowa yang senantiasa menemani dan menjadi saudara selama kami bersama.

12. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan kepada kalian diucapkan banyak terima kasih.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin yaa rabbal alamin.*

***Wassalamu' Alaikum Wr.Wb***

Makassar, 24 Juni 2015

Penyusun,

RATU FAISA  
NIM:10400111047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xviii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10

### **BAB II : Tinjauan Umum**

A. Kriteria Pemaksaan Hubungan Seksual Sebagai Kekerasan Seksual .....	11
B. Pengertian KDRT Menurut UU No.23 Tahun 2004 .....	13
C. Pasal-pasal Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang P-DKRT .....	19
D. Relasi Suami Istri Dalam Islam.....	21

### **BAB III : Penyajian Bahan Hukum Penelitian**

A. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT	
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga .....	27
2. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Dalam UU N0. 23 Tahun 2004 .....	33
3. Hukuman Pelaku Pemaksaan Seksual .....	40
B. Hukum Islam	
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga .....	41
2. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Dalam Hukum Perkawinan .....	

Islam .....	45
3. Hukuman Pelaku Pemaksaan Seksual .....	53

#### **BAB IV : Analisis Perbandingan Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri**

##### **( Telaah UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)**

A. Dari Segi bentuk .....	55
B. Dari Segi Sanksi .....	56

#### **BAB V : Penutup**

A. Kesimpulan .....	60
B. Implikasi Penelitian.....	61

#### **DAFTAR PUSTAKA .....62**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN LAMPIRAN**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengantitik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet(dengantitik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Sad	S	Es (dengantitik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengantitik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	apostroferbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathahdanya</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hau-la*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah dan alif</i> a	a	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
اُ...	<i>dammah dan wa</i> u	u	u dan garis di atas

Contoh: مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

### 4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh: رَبَّنَا : *rabbana*  
نَجِّينَا : *najjaina*  
الْحَقَّ : *al-haqq*  
الْحَجَّ : *al-hajj*  
نُعِمْ : *nu“ima*  
عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh: الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

الْكُنُوءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.



Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*      بِإِلَهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadunillarasul*

*Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan*

*Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'a>n*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu> (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contohnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

KDRT = Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UUD = Undang-Undang Dasar

swt. = Subhanau wa ta'ala

saw. = Sallallahu 'alaihi wa sallam

QS.../..... = QS. An-Nisa/4: 34, Q.S At-Thalaq/: 6, QS Al-Baqarah/: 223.

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه و سلم

## **ABSTRAK**

Nama : Ratu Faisa  
Nim : 10400111047  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)

---

Pemahaman bahwa wanita (istri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami dan jika istri menolak ajakan seks suaminya, maka ia dikatakan berdosa besar kerap kali dijadikan sebagai alasan atas nama agama. Dengan demikian, menjadi wajar jika kemudian terjadi pemaksaan seksual suami terhadap istri yang seharusnya diantara keduanya saling menggauli dengan cara yang *ma'ruf* dan penuh kasih sayang. Dengan adanya kenyataan itulah, maka penyusun melakukan penelitian mengenai pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri telaah undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukum Islam.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah pemaksaan seksual suami terhadap istri telaah undang-undang no.23 tahun 2004 dan hukum Islam, dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana pandangan undang-undang no.23 tahun 2004 terkait dengan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri? dan 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri?

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan melakukan kajian *library Research* (studi kepustakaan) dengan mengumpulkan buku-buku atau referensi yang membahas tentang tema penelitian ini. Karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang undang-undang dan hukum Islam. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian *yuridis syar'i* dengan menggunakan *analisis komparatif* yaitu dengan membandingkan antara undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut UU No.23 tahun 2004, menurut undang-undang tersebut seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga. Karena seks juga adalah hak istri, hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama dengan penindasan. Hanya satu pihak saja yang bisa menikmati, sebab istri tidak menginginkan hubungan itu dan ia tidak akan teransang dan terpuaskan, malah bisa tersakiti secara fisik dan psikis. Pada ketentuan pasal 5 dan 8 undang-undang PKDRT. Sedangkan, menurut hukum Islam seorang suami

boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap *nusyus*, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Terkait masalah ini didalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang mengharamkan hubungan seksual meskipun antara suami istri. Yakni keadaan dimana suami memaksa istri untuk berhubungan seksual, sementara istri sedang haid, dan tidak sehat. Dalam hubungan seksual harus didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil al ma'ruf*, karena apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan kecil kemungkinan akan terjadi *nusyus*.

Implikasi dari skripsi ini adalah: 1) perlunya meningkatkan pemahaman dan penafsiran terhadap teks Al Qur'an dan hadis supaya tidak terjadi pemahaman teks keagamaan yang bias gender . 2) Dengan adanya pembentukan peraturan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjadi sebuah penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban dalam rumah tangga khususnya terhadap kekerasan seksual.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Kadang dalam aktifitas pemenuhan itu terjadi perbenturan dan persengketaan antar manusia. Allah menurunkan aturannya sebagai solusi bagi persoalan manusia. Adanya penetapan hak dan kewajiban tidak lain terkait dengan kemaslahatan manusia, baik pria maupun wanita, dalam pandangan Allah sebagai Asy-Syar'i akan sama jika memang tabiat keduanya selaku manusia mengharuskan solusi yang sama.<sup>1</sup>

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri serta hidup damai dalam rumah tangga ialah sesuatu yang pasti sangat di idamkan oleh setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila didalamnya ternyata dinodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita (suami isteri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah disatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri.<sup>2</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW. menjelaskan sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اكمل المؤمن إيمانا  
أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم { رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه }<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam* (Jakarta: Insani, 2004), h. 114

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.51.

<sup>3</sup> Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa, Ibn Saurah, *Sunnah at-Tirmidzi* (Beirut : Dar al Fikr, 1994), h.378.

Artinya:

*Dari Abu Hurairoh, ia berkata, Rasulullah saw bersabda ; iman orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya dan yang terbaik diantara kamu sekalian adalah yang terbaik memperlakukan istri. (HR. Tirmidzi, Ahmad dan Ibn Majah ).*

Pada prinsipnya dalam hubungan seksual suami dan isteri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami isteri). Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu “birahi” sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang isteri dalam keadaan capek, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi saat haid. Kekerasan seksual terhadap isteri atau biasa dikenal dengan *Marital rape* yang diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Yang dimaksud pemerkosaan disini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap isteri. Dengan demikian *Marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi isteri.<sup>4</sup>

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan aturannya secara jelas, terkait dengan marital rape sebagai pemerkosaan terhadap perempuan. Dan telah dijelaskan juga bagaimana hak-hak perempuan tanpa paksaan, yaitu sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara;

---

<sup>4</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Isteri* (Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 11-12.

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. penelantaran<sup>5</sup>.

Persoalan menarik dalam hukum perkawinan Islam adalah terjadinya bias gender dalam penafsiran teks keagamaan, sehingga memunculkan corak pemahaman yang merugikan kaum perempuan. Sebuah contoh penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an dalam QS Al-Baqarah/: 223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya;

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*<sup>6</sup>

Ayat ini mungkin lebih dimaksudkan sebagai pemberitahuan tentang kesuburan wanita dari pada tentang seks, akan tetapi para ulama memahaminya sebagai *dictum* pada wanita (isteri) dalam keadaan apapun harus memenuhi keinginan seksual suami. Dengan pemahaman seperti ini, maka suami bisa berbuat bebas sekehendak hatinya tanpa memperhatikan kepentingan istri dalam hal yang sama, yaitu seks. Jika istri menolak ajakan seks suaminya, ia dikatakan berdosa besar. Tidak pernah di

<sup>5</sup> Abdul Rahman Shaleh, Dkk. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta: YLBHI, 2007), h. 119.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Klaten: Quran, 2009), h. 35.



ungkapkan yang sebaliknya, dalam arti seorang suami juga akan mendapatkan dosa yang sama besarnya jika ia menolak kehendak seks istrinya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, kajian terhadap hukum pemaksaan seksual suami terhadap khususnya isteri perlu mendapat perhatian yang serius dan digali lebih dalam lagi agar masyarakat dapat mengerti apa yang seharusnya dimengerti dan bukan kesalahpahaman yang dimengerti, sehingga kekaburan pemahaman terhadap hak, peran dan status isteri didalam rumah tangga dapat menjadi jelas.

Dari dua perbedaan pandangan antara UU N0. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam, menjadikan wacana hubungan seksual suami isteri menarik untuk dikaji lebih dalam.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka masalah pokok pembahasan yaitu, bagaimana Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri telaah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam.

Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan undang-undang No. 23 tahun 2004 terkait dengan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri?

---

<sup>7</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Cet, I; Yogyakarta: LKiS, 2005), h.104.

### ***C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Adapun judul penelitian ini adalah Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri telaah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 dan Hukum Islam. Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan beberapa variable berikut ini :

1. Pemaksaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yg diharuskan walaupun tidak mau. Dari proses, cara, perbuatan yang memaksa. Paksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Dalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan sebagai kejahatan paksaan.
2. Hubungan Seksual atau senggama atau koitus adalah keadaan biologis berupa pemasukan penis pria ke vagina wanita untuk tujuan reproduksi.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber pada nilai-nilai keislaman yang berasal dari dalil-dalil agama Islam atau tingkah laku yang mengatur

tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya yang berasal dari Allah swt.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh Penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa karya yang telah merintis kajian tentang pemaksaan hubungan seksual. Dari sekian karya tersebut, penulis belum mendapatkan satu karya yang membahas secara khusus mengenai Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri (Telaah UU N0. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam).

Diantaranya skripsi oleh Aulia Puspasari, mahasiswi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “ Pemaksaan seksual suami terhadap istri studi komparatif hukum perkawinan islam” Adapun fokus pembahasan dalam skripsi Aulia Puspasari mengkaji tentang bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga menurut hukum perkawinan islam.<sup>8</sup>

Adapun buku-buku di antaranya;

1. Milda Marlia dalam bukunya “*Marital Rape (Kekerasaan Seksual Terhadap Istri)*”, dalam buku ini membahas tentang pemerkosaan dalam perkawinan. Yang dimaksud pemerkosaan disini ialah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak.<sup>9</sup>
2. K.H Husein Muhammad dalam bukunya “*Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*”. Dalam buku ini membahas tentang perencanaan

---

<sup>8</sup> Aulia Puspasari, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, t.p., 2009)

<sup>9</sup> Milda Marlia, *Marital Rape (Kekerasaan Seksual Terhadap Istri)*, h. 11.

dan pengaturan proses reproduksi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Perempuan. Dengan demikian perempuan dapat bebas dari ketakutan, tekanan serta tindak kekerasan, dan menggunakan haknya untuk menikmati kemajuan teknologi kesehatan reproduksi.<sup>10</sup>

3. M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, dalam bukunya “ *Meraih berkah dengan menikah*”. Dalam buku ini kajiannya pada pernikahan dalam perspektif keperempuanan, membahas posisi perempuan dalam konteks persiapan berkeluarga. Lazimnya pernikahan masih dikuasai oleh para lelaki yang di anggap bakal “memiliki” perempuan, bukan sebaliknya. Perspektif yang kurang serupa itulah yang sering menjadi sumber kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>
4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam bukunya “*Fatawa An-Nisa*”. Dalam buku ini memberikan pelajaran penting bagi para wanita, terutama bagaimana menjadi seorang muslimah sejati. Wanita diciptakan dengan potensi fisik yang banyak memiliki problematika diantaranya wanita mengalami menstruasi dan kemampuan fisiknya lebih lemah dari laki-laki.<sup>12</sup>
5. Dalam kitab *al-umm* karya Imam Asy Syafi’i yang diterjemahkan oleh Abdullah Muhammad bin Idris juga membahas tentang hak dan kewajiban suami istri serta keharusan istri untuk mentaati perintah suami, termasuk

---

<sup>10</sup> K.H Husein Muhammad, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Cet, I; Jakarta: 2002).

<sup>11</sup> M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih berkah dengan menikah* (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010)

<sup>12</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Fatawa An-Nisa* ( Jakarta: Ailah, 2005), h. 20.

diperbolehkannya seorang suami untuk memaksa istri berhubungan seksual.<sup>13</sup>

### ***E. Metodologi Penelitian***

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.

Dalam metode ini peneliti menggunakan metode bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan<sup>14</sup>. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut di atas.

#### **2. Metode Pendekatan**

Dalam metode ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis Syar'i. Maksud dari pendekatan ini adalah cara mendekati masalah dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT dan Hukum Islam. Dan pendekatan

---

<sup>13</sup> Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Mukhtashar kitab al-Umm fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Amiruddin, dengan judul ringkasan kitab al-Umm (Cet, I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 14.

<sup>14</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berkaitan hubungan seksual suami terhadap istri.

- b. Pendekatan historis, yaitu penulis mencoba mendekati permasalahan dan menghubungkan pemaksaan pemahaman hubungan seksual suami terhadap istri dalam pandangan UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini peneliti menggunakan metode bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan (*Library research*) dan dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut di atas. Adapun beberapa sumber data yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber data primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat. Dikatakan mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun yang menjadi data primer didalam penelitian ini adalah Pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri telaah UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan buku-buku literatur.<sup>15</sup> Dan rujukan semisalnya yang secara langsung maupun tidak

---

<sup>15</sup>Uma Sukarna. *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 26 .

membahas permasalahan yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini.

#### ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui lebih jauh mengenai pandangan UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam terkait dengan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri.
- b. Membandingkan pandangan UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum terkait dengan pemaksaan seksual suami terhadap isteri tersebut kemudian mencari letak persamaan dan perbedaannya.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang studi perbandingan hukum yaitu UU No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam terkait dengan pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isteri dalam rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bersifat pengarah positif kepada masyarakat serta upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan bernilai kemanusiaan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Kriteria Pemaksaan Hubungan Seksual Sebagai Kekerasan Seksual**

Kekerasan dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi didalam perkawinan. Sebelum mengungkap lebih jauh mengenai kekerasan ini, harus diketahui terlebih dahulu apa arti kekerasan itu. Menurut pasal 1 Deklarasi PBB pada tanggal 20 Desember 1993 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa, "yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada

---

<sup>1</sup>Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), h. 8.

hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan.<sup>2</sup>

Pemuasan hasrat seksual merupakan salah satu alasan utama perkawinan. Namun makna perkawinan sesungguhnya lebih luas daripada sekadar seks. Perkawinan juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis dan emosional. Saling bersimpati dan saling memperlakukan dengan baik dapat melanggengkan cinta bahkan ketika masa-masa “penuh gairah” telah berlalu.<sup>3</sup>

Kata ‘pemaksaan hubungan seksual’ didalam penjelasan undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 8 huruf a hanya dijelaskan secara global yaitu setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan atau kehendak istri. Kriteria Pemaksaan hubungan seksual tersebut terjadi bila istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar yaitu seks anal dan seks oral dan istri dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak disukai yaitu ketika dalam keadaan haid, nifas, sakit atau bahkan sedang hamil.

Kekerasan seksual dalam perkawinan (Marital Rape) dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa mempedulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri.

---

<sup>2</sup> Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 55.

<sup>3</sup> Hasan Hatout, *Panduan Seks Islami* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), h. 31.

Berdasarkan konteks kejadian tercatat ada empat *kriteria kekerasan seksual dalam perkawinan* (Marital Rape) yaitu:

1. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan
2. Hubungan seksual dengan ancaman
3. Hubungan seksual dengan memperturukan selera/ kehendak sendiri tanpa persetujuan korban
4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol (untuk meningkatkan kemampuan seks laki-laki, tanpa mempedulikan kemampuan dan kehendak perempuan).<sup>4</sup>

Pada beberapa skala, disaat seorang perempuan jatuh dalam jebakan, baik itu berupa kekerasan maupun kekejaman, ia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis dan meratapi nasibnya, ia kebingungan dan terjerat dan tidak tahu apa yang harus dilakukan agar bisa keluar untuk membebaskan diri.<sup>5</sup>

## **B. KDRT Menurut UU NO. 23 Tahun 2004**

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami-isteri atau kekerasan oleh orangtua terhadap anak. KDRT adalah salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan tindakan diskriminasi.

Menurut UU NO. 23 tahun 2004 tentang PDKRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) Pasal 1 Butir 1:

---

<sup>4</sup> Eli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual*, dalam Irwan Martua Hidayana, *Seksualitas: Teori dan Realitas* (Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004), h.143.

<sup>5</sup> Qasim Amin, *The New Women*, Ter. Syariful Alam, “Sejarah Penindasan Perempuan; Menggugat Islam Laki-Laki, Menggugat Islam Perempuan” (Yogyakarta: t.p., 2003), h. 91.

*KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga .<sup>6</sup>*

Sedangkan untuk anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan masih sering kita jumpai dimana-mana didalam rumah tangga, dilingkungan kerja, dalam lingkungan sosial, dan dalam kehidupan bernegara.<sup>7</sup> Kekerasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan:<sup>8</sup>

1. Perihal yang bersifat, berciri khas
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain
3. Paksaan

Kekerasan adalah perilaku yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, baik yang bersifat terbuka atau tertutup.<sup>9</sup> Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri tanpa memperdulikan keadaan istri yang mungkin dalam kondisi lemah baik fisik maupun non fisik. Melakukan hubungan seksual berkali-kali dalam

---

<sup>6</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>7</sup> Abdul Muqsit Ghozali, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* (Cet. I; Jakarta: Rahima, 2002), h. 105.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 550.

<sup>9</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan 2005), h. 154.

waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupi melakukan hubungan seksual dengan ancaman paksaan.

Hubungan seksual yang dilakukan suami dan istri, yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut adalah suami. Sementara itu istri hanya bersifat pasif, hanya melayani. Tidak pernah mengungkapkan perasaan puas atau tidaknya dalam hubungan seksual itu. Hal seperti ini terjadi disebabkan oleh salah satu pihak melaksanakan kehendak seksual sendiri terhadap pasangannya. Dan menganggap bahwa hal itu kewajiban perempuan, sehingga para suami mengabaikan hak istri untuk menikmati hubungan seks.

Secara jelas UU tersebut tidak menyertakan kata-kata perkosaan, akan tetapi hanya menyertakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Selain mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan UU No. 23 Tahun 2004 juga mengatur mengenai bukti dan saksi yang diatur dalam pasal 55. Pasal ini merupakan titik terang untuk para korban marital rape. Karena pasal ini meringankan korban dalam hal bukti dan saksi. Selain itu undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak korban yang diantaranya ialah:

1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah ataupun swasta.
2. Korban berhak mendapatkan jaminan atas haknyayang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, dan anggota rumah tangga lainnya.

Rumah tangga yang bahagia, rukun, aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 29 Undang-

Undang RI Tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini harus terus dikembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga itu sendiri, terutama pada perilaku dan pengendalian dirinya. Jika perilaku dan pengendalian dirinya tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu yang akhirnya memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Segala bentuk kekerasan utamanya kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, hal ini didasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 serta perubahannya, yang berbunyi:

#### Pasal 28 G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

#### Pasal 28 H

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.<sup>11</sup>

Dewasa ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis, seksual dan lain-lain marak terjadi diberbagai penjuru Indonesia sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan

---

<sup>10</sup> M.Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 186.

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945, Bab xa Pasal 28*.

dalam rumah tangga. Dalam KUHP sekarang ini, sebagian kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang perlu dijamin dengan pasal-pasal kejahatan, namun terbatas pada tindak pidana umum seperti kesusilaan, perkosaan dan penganiyaan. Dalam KUHP khususnya dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penipuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial yakni hanya dilindungi bagian-bagian tertentu saja dari tubuhnya dalam rumah tangga suami adalah pelindung dan istri harus selalu patuh pada keinginan suaminya.

KUHP telah mengatur penganiyaan ataupun tindakan kekerasan terhadap isteri sebagai tindak pidana, bahkan KUHP menganggap tindak penganiyaan yang dilakukan terhadap istri dan anggota keluarga lainnya merupakan tindak penganiyaan berat, sanksinya lebih berat 1/3 dari sanksi penganiyaan yang dilakukan kepada orang lain.<sup>12</sup> Dengan menganggap kekerasan terhadap isteri adalah kejahatan umum bukan kejahatan khusus maka KUHP tidak mengenal konsep kekerasan berbasis gender, karena sesungguhnya ada kejahatan yang dilakukan karena jenis kelamin seseorang yaitu perempuan. Akibatnya perempuan tidak terlindungi dari kekerasan.

Dalam khazanah hukum di Indonesia tidak ada satu peraturan yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan (Kejahatan Seksual) baik dalam KUHP maupun dalam RUU revisi KUHP yang sekarang digodok oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Terlebih lagi dalam UU Perkawinan NO.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan utamanya kekerasan dalam rumah tangga belum dianggap penting oleh penegak hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ratna Batari Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Cet. I; Lembaga Kajian Agama dan Gender; Jakarta: 1999), h.18.

<sup>13</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 171.



Dalam revisi KUHP, misalnya kekerasan seksual hanya dibatasi pada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan diluar perkawinan. Dengan demikian, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya sendiri bukan merupakan delik. Pandangan demikian merupakan cerminan budaya yang dianut dimasyarakat, bahwa seorang istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya dan karenanya harus bersedia melayani keinginan seksual suaminya kapan dan dimana saja.

Sejalan dengan maraknya kekerasan dalam rumah tangga maka pada tanggal 14 September 2004, DPR akhirnya menyetujui RUU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk disahkan menjadi undang-undang, nilai strategis dari undang-undang ini adalah menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu publik, maksudnya jika dulunya masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah hubungan suami-istri (masalah pribadi) yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain, bahkan KUHP sendiri tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai sebuah kejahatan criminal, UU penghapusan KDRT inilah yang memberikan ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga.

UU ini menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, utamanya perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penyaltaaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*, h.177.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan walaupun secara umum didalam kitab undang-undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiyaan dan kesusilaan, serta penelantaran orang yang diberikan nafkah.<sup>15</sup>

### C. PASAL-PASAL KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG

#### P-KDRT

Ketentuan pasal 5 UU P-KDRT menegaskan bahwa:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga,”<sup>16</sup>*

Kekerasan fisik, psikis, seksual, semakin menegaskan bahwa cakupan diskriminasi adalah berupa bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ancaman-ancaman lain serupa, ”Ancaman lain” yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 UU P-DKRT disebut dengan istilah “penelantaran rumah tangga”. Bahkan UU P-KDRT pun telah menegaskan dalam pengaturan normatifnya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan **pasal 5** mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan: fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga, yang dijabarkan lebih lanjut dalam:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> M.Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 189.

<sup>16</sup> *Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*, h. 12.

<sup>17</sup> *Undang-Undang RI. No. 23 Tahun. 2004 tentang Penghapusan KDRT*, h. 12-13.

#### Pasal 6

kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

#### Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

#### Pasal 9

Penelantaran rumah tangga yaitu:

- (1) Tindakan/perbuatan seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud diatas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 49 UU**

**P-KDRT** menghambat penghapusan **KDRT**, karena terdakwa dengan ekonomi maupun cenderung memilih hukuman denda ketimbang hukuman penjara. Hal ini sebetulnya sangat ditentukan oleh peran hakim yang akan menentukan berat atau ringannya putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara KDRT. Untuk hal itu sangat

diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan sentisiasi gender dikalangan para hakim termasuk sentisiasi untuk keberpihakan pada keadilan korban, hal mana korban lebih sering pada perempuan dan atau anak.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dikenai sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam **pasal 44** sampai dengan **pasal 49**.

#### D. RELASI SUAMI ISTRI DALAM ISLAM

Relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” (pergaulan suami isteri yang baik).

Dalam Q.S. An-Nisaa’/4:19 ditegaskan;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami isteri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan

<sup>18</sup> Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT , h. 30.

terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban menjadi landasan etis yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik sebagai subyek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.

Sebagai uswah hasanah bagi umatnya, Rasulullah membangun relasi dalam keluarga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender istri-istrinya seperti Khadijah, Aisyah, Zainab, Hindun, Ummu Salamah. Termasuk kecintaan beliau kepada Fatimah dan 2 anaknya merupakan gambaran keluarga besar yang sakinah bebas dari diskriminasi dan kekerasan.<sup>19</sup>

Suami isteri merupakan pasangan yang memiliki komitmen bersama dalam membangun sebuah mahligai rumah tangga, satu sama lain saling melengkapi. Demikian pula ketika menentukan kriteria suami yang shalih juga tidak dapat dipisahkan dengan menentukan kriteria istri yang shalihah.

Secara umum, kriteria suami istri yang baik antara lain, memiliki sifat setia, jujur, bertanggungjawab, bijaksana, adil dan demokratis. Adapun kriteria suami istri yang baik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menerima kondisi pasangan apa adanya

Setiap manusia memiliki potensi, kelebihan dan kekurangan. Setiap orang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan seideal mungkin. Bahkan dalam Hadis nabi juga disebutkan bahwa perempuan dan laki-laki dinikahi karena kecantikan, keturunan, harta yang dimiliki, dan agama. Dalam realitas kehidupan

---

<sup>19</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 153.

keempat kriteria tersebut jarang sekali dijumpai secara keseluruhan (sempurna) pada diri seseorang. Kesadaran untuk menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian menerimanya dengan tulus ikhlas atas kelebihan dan kekurangan pasangan karena Allah merupakan modal utama dalam melanggenkan rumah tangga. Seringkali rumah tangga rapuh karena melihat pasangan atas dasar *stereotype* (pelabalan negative), misalnya berpandangan bahwa karakter suami adalah egois, cemburuan, kasar, tidak sabaran dan sebagainya. sebaliknya istri memiliki karakter cerewet, mudah putus asa, kurang tanggungjawab, tidak mampu mandiri, matre, hidup konsumtif, dan sebagainya. Rumah tangga yang diwarnai dengan *stereotupe* ini tidak akan melahirkan sikap *qanaah* terhadap karunia Allah, sehingga melihat pasangannya selalu dengan kaca mata negative dan kebencian. Lain halnya jika menerima pasangan dengan apa adanya, tanpa disertai pandangan *gender stereotype*, akan melahirkan sikap lapang dada, syukur, sabar dan qanaah.

2. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban
3. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran
4. Saling memahami perbedaan pendapat, dan pilihan peran
5. Saling memberdayakan untuk peningkatan kualitas pasangan
6. Mengatasi masalah bersama
7. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Salah satu fungsi keluarga adalah untuk mengembangkan keturunan dengan cara legal dan bertanggungjawab secara social maupun moral. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar terdapat pada manusia laki-laki maupun perempuan.

Merupakan hal yang alami atau sunatullah jika suami istri satu sama lain saling membutuhkan, dan saling memenuhi kebutuhan biologis merupakan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan yang perlu disalurkan sesuai dengan petunjukNya.<sup>20</sup> Seks bukanlah yang tabu dalam Islam, tetapi dianggap sebagai aktifitas yang sah dalam perkawinan. Tidak ada konsep dosa yang dilekatkan kepadanya. Seks dianggap kebutuhan prokreasi, dan penciptaan manusia adalah melalui aktifitas seksual. Karena prokreasi perlu bagi kelangsungan hidup manusia, maka perkawinan dalam islam menjadi penting sekalipun belum tentu wajib hukumnya.<sup>21</sup>

Laki-laki dan perempuan memang berbeda struktur alat reproduksinya, tetapi secara psikologis Allah memberikan perasaan yang dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Oleh karena itu, suami maupun istri tidak diperbolehkan bersifat egois, mengikuti kemauan sendiri dengan mengabaikan kebutuhan pasangannya. Sebab perkawinan memiliki tujuan yang agung, dan merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati. Q.S. al-Balqarah/2:187 menegaskan;

هٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Terjemahnya:

....Mereka adalah pakaian bagimu, dan akupun adalah pakaian bagi mereka.

Suami isteri digambarkan sebagai baju. Baju berfungsi untuk menutup aurat, melindungi badan dari teriknya matahari dan dinginnya udara, dan juga untuk

<sup>20</sup> Andi. Syahraeni, *Bimbingan keluarga Sakinah*, h. 165.

<sup>21</sup> Farid Wajidi dan Cicit Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994), h.139.

menghias diri. Dalam konteks suami istri memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual atas pasangannya, dan juga bertanggungjawab atas pemenuhan dan pemuasan kebutuhan seksual pasangannya secara *ma'ruf* dalam arti setara, adil dan demokratis. Aktivitas seksual suami istri diharapkan dapat menumbuhkan perasaan indah, mengokohkan rasa kasih sayang dan juga melahirkan rasa syukur kepada dzat yang member keindahan dan kasih sayang pada manusia.

Relasi seksual suami isteri merupakan pahala jika dilakukan dengan cara-cara yang *ma'ruf*, karena masing-masing suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban terkait dengan relasi seksual ini yang diharapkan dapat memelihara komunikasi lahir bathin dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Hanya saja ditekankan bahwa semua itu harus dilakukan dengan memperhatikan etika, tanpa merugikan kedua belah pihak, atau merugikan satu pihak atas pihak lainnya.

Mengingat pentingnya mengelola relasi seksual suami istri dalam rumah tangga, maka diharapkan suami atau istri berpenampilan yang menyenangkan bagi pasangannya. Mengenali selera pasangan merupakan cara yang tepat. Hubungan seks bukan merupakan hal yang tabu dibicarakan diantara suami isteri. Karena itu penting mendiskusikan demi kemaslahatan bersama, seperti apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Apa yang kurang dari pasangannya yang dapat mengganggu hubungan baik dan sebagainya. Sebaliknya membicarakan masalah kekurangan atau ketidakpuasan dalam hubungan suami isteri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, bahkan akan dapat membuka aib sendiri.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi seksual suami istri dalam islam menghindari adanya kekerasan seksual terhadap isteri. Masalah ini



menjadi persoalan serius tetapi banyak orang yang mengabaikannya. Sebagai dampak dari masalah ini adalah kekerasan seksual yang biasanya tidak mudah diungkap karena menjadi rahasia mereka berdua, lebih parah lagi jika menggunakan alasan agama untuk memaksakan kehendaknya. Solusi terbaik adalah:

1. Menyadari bahwa perubahan konstruksi gender dimasyarakat berpengaruh pada relasi suami istri dalam rumah tangga
2. Membicarakan dengan baik masalah seks dengan pasangannya.
3. Suami menyadari bahwa kondisi ekonomi menjadi masalah umum yang dihadapi rumah tangga di negara berkembang seperti di Indonesia.
4. Berbagi peran domestic dan mengatur pekerjaan seemikian rupa sehingga istri masih mempunyai waktu dan tenaga untuk kebutuhan seksualitasnya.
5. Menyadari bahwa relasi seksual memang dianjurkan oleh agama, tetapi prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Suami dan istrilah yang paling memahaminya.<sup>22</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

---

<sup>22</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan keluarga Sakinah*, h. 169.

### **BAB III**

#### **PENYAJIAN BAHAN HUKUM PENELITIAN**

##### **A. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT**

###### **1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga**

Hak adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sedangkan kewajiban berasal dari bahasa arab yaitu *wajib*, yang berarti sesuatu yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan berdosa jika ditinggalkan.

Jadi dalam hal hak dan kewajiban suami istri dapat dipahami bahwa hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami, dan begitupun sebaliknya dalam hal kewajiban masing-masing suami istri.<sup>1</sup>

###### **a. Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Negara Indonesia merupakan negara yang mendasarkan segala kegiatan kehidupan pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dengan ancaman akan dikenakan suatu sanksi atau tindakan apabila melanggarnya.<sup>2</sup> Salah satu produk Nasional adalah pada tanggal 7 januari tahun 1974, disahkannya Undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Undang-undang

---

<sup>1</sup> Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *FIKIH II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.108.

<sup>2</sup> R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP* (Surabaya: CV.Amin, 1985), h.11.

perkawinan tersebut pada penerapannya dirasakan sudah mantap sekalipun masih di perlukan upaya lain untuk mempertahankan eksistensinya dalam pengakuan hukum perkawinan.

Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-undang perkawinan pasal 30 menyatakan: "Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Undang-undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami-isteri yang menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.<sup>3</sup>

Inilah yang membedakan antara hukum perkawinan dengan Undang-undang hukum perdata. Di dalam Undang-undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami isteri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidak hadirannya suami atau sebab-sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada isteri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.

Undang-undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R.

---

<sup>3</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* (Cet, 18; Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 547-548.

Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.<sup>4</sup>

Kemudian pasal 32 Undang-undang perkawinan menerangkan:

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah, yang bisa di tempati pasangan suami-isteri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami-isteri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami-isteri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula isteri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang perkawinan.

Pada pasal 33 Undang-undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

---

<sup>4</sup> Lili Rasjidi, *hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Cet, I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 125.

Sedangkan pasal 34 Undang-undang perkawinan menegaskan:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi isteri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan isteri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik isteri atau suaminya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-isteri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:<sup>5</sup>

1. Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.
3. Suami-isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun pasal 78 KHI menjelaskan:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Departemen Agama RI; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h. 40.

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 40.

- 1) Suami-istri harus mempunyai kediaman yang sah.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami isteri bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan Suami-

isteri terdapat dalam pasal 79, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah- tangga yang penting di putuskan oleh suami-isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - (a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
  - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - (c) Biaya pendidikan anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 41.

<sup>8</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 41-42.

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isteri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam pasal 82 KHI menerangkan tentang kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban member tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban isteri terhadap suaminya, yaitu:<sup>11</sup>

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika Ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya

---

<sup>9</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 42.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 43.

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, h. 43-44.

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## 2. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Dalam UU N0. 23 Tahun 2004

*Marital rape* adalah kosakata inggris, gabungan dari kata *marital* yang berarti “segala hal yang terkait dengan perkawinan” dan *rape* yang berarti “pemeriksaan”.<sup>12</sup> Dengan demikian, *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Pengertian *marital rape* menurut para ahli. *Marital rape* oleh Bergen, seperti dikutip Siti Aisyah, diartikan sebagai hubungan seksual lewat vagina, mulut maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri tidak sadar.<sup>13</sup> Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* kedalam 3 bagian, yaitu: pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut:

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.

<sup>12</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 373 dan 465.

<sup>13</sup> Siti Aisyah, *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: 2001), h. 29.

<sup>14</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari kehidupan Rasul* (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998), h.24.



2. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri, misalnya dengan oral dan anal.
3. Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan istri mengalami luka ringan atau berat.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual diatas tidaklah mutlak, bisa berubah setiap saat, bahkan sekarang semakin Variatif. Perkawinan merupakan upaya untuk mempersatukan lak-laki dan perempuan dengan latar belakang yang berbeda, untuk mencari titik temu atas perbedaan latar belakang ini membutuhkan berbagai metode yang harus efektif karena perbedaan latar belakang disatu sisi lain membuka peluang terjadinya konflik yang menguntungkan perempuan disisi lain, perbedaan latar belakang suami istri dan struktur social yang selalu menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan yang dinilai sebagai bagian dari terjadinya tindak kekerasan.<sup>15</sup>

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang di akomodir oleh UU No. 23 Tahun 2004.

Istilah “kekerasan” mengingatkan kita pada perbuatan yang kasar, mencekam, menyakitkan dan berdampak negative. Sayangnya, kebanyakan orang selama ini memahami kekerasan sebatas perilaku fisik yang kasar, keras, dan bengis. Kekerasan yang paling menyedihkan adalah kekerasan yang terjadi di dalam lembaga yang paling sacral yaitu kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap

---

<sup>15</sup> Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.195.

perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya.<sup>16</sup>

Untuk mengetahui secara jelas tentang bentuk pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perspektif UU No. 23 tahun 2004, dapat didenifisikan sebagai uraian berikut ini; UU kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan dalam kategori empat macam, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kekerasan seksual berat yang terdiri :
  - a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina, dan merasa dikendalikan.
  - b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.

---

<sup>16</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Isteri*, h. 18.

- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan.
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
- e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
- f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

## 2. Kekerasan Seksual Ringan ialah

Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti: gurauan porno, siulan, ejekan, dan julukan dan atau non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Berbeda dengan KUHP, UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai bentuk hukum acara yang berbeda, sehingga walaupun dalam UU tersebut tidak ada kata-kata yang menyinggung perkosaan dalam perkawinan, namun dalam UU tersebut ada kata-kata untuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada pelaku diluar rumah tangga, namun juga pada pelaku didalam rumah tangga UU No.23 tahun 2004 mengakui bahwa realitas pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan) tidak hanya terjadi diluar perkawinan, bahkan dalam sebuah perkawinan realitas pemaksaan hubungan seksual malah sering terjadi.

Namun harus disadari pula bahwa setiap korban mau melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual (marital rape) yang dialaminya, banyak sebab yang membuat para korban enggan untuk melapor. Sebagian dari mereka menganggap bahwa persoalan seksual dalam sebuah keluarga adalah persoalan domestic, yang publik tidak berhak untuk ikut campur. Dalam sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang di adopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:

1. Tindak kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin(mahar), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan.
2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi pada masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.
3. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.<sup>17</sup>

Kekerasan seksual atau tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun, bila salah satu seorang dari dua insane yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dialami antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa

---

<sup>17</sup> Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: Lkis), h.12-13.

persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diluar nikah.<sup>18</sup>

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai superioritas suami terhadap istri. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es.<sup>19</sup> Dimana masih tersembunyi dan sulit terdeteksi yang muncul dan kelihatan dipermukaan hanya sedikit. Persepsi istri tentang kekerasan seksual berkaitan erat dengan kondisi dan situasi dan pengalaman yang dialami istri dalam melakukan hubungan intim dengan suami. Meskipun persepsi setiap istri tentang kekerasan seksual berbeda tapi secara umum bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Hubungan seksual dengan paksaan

Memaksa istri untuk berhubungan badan pada istri sedang tidak bergairah, kelelahan sesudah beraktifitas seharian, baik didalam rumah ataupun diluar rumah. Memukul stsu menghempaskan istri ketempat tidur bila menolak hubungan suami istri. Suami menuntut istri melayani nafsu seksualnya, kapanpun, dimanapun, tanpa memperhatikan kondisi istri.

2. Hubungan seksual dengan ancaman

Melakukan ancaman saat istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, missal ancaman dengan benda tajam. Meskipun tidak sampai melukai fisik

---

<sup>18</sup> Fathul Djannah, dkk. *Kekerasan Terhadap Isteri*, h. 45.

<sup>19</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*, h. 155.

istri, akan tetapi kekerasan seksual dengan ancaman ini dapat menghancurkan kepribadian istri.

### 3. Hubungan seksual dengan memaksakan keinginan sendiri

Memaksa istri untuk berhubungan suami istri dengan cara dan gaya yang diinginkan suami, sementara istri tidak menyukai. Seperti melakukan hubungan badan dengan yang aneh bagi istri, berhubungan badan saat istri sedang haid.

### 4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat terlarang atau minuman beralkohol

Bentuk lain dari kekerasan seksual adalah hubungan suami istri yang dimaksudkan untuk menyakiti istri. Dengan cara memakai obat terlarang, mabuk, yang menyebabkan istri tersiksa saat berhubungan badan karena bau alkohol yang menyengat hidung istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan intim selama mungkin saat pengaruh obat menguasai dirinya.<sup>20</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, suami, istri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga, ataupun orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Bahkan perempuan lebih banyak mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Pelaku kekerasan adalah orang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya : seperti ayah, paman, kerabat, dan orang-orang didalam rumah sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nurul Ilmi Idrus, Marital Rape, *Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan* (Yogyakarta : Kerjasama Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dengan Fond Foundation), 1999, h.25.

<sup>21</sup>LBH APIK Jakarta, Undang-Undang, h.3.

### 3. Hukuman Pelaku Pemaksaan Seksual

Umumnya tiap perbuatan yang berakibat hukum, utamanya tindak pidana harus diberi sanksi hukum. Keempat macam kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi) yang seringkali dialami oleh istri dalam lingkungan rumah tangga merupakan pelanggaran HAM. Meskipun kehidupan sangat terpengaruh oleh nilai-nilai agama dan budaya serta pemahaman nilai agama yang cenderung permisif menempatkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat langka, namun penganiayaan ini sangat erat kaitannya dengan HAM, maka tindakan ini tetap diproses secara hukum dalam pasal 46 dan 48 yaitu :

Pasal 46:

“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000 (Lima puluh enam juta rupiah).<sup>22</sup>

Pasal 48:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya 4 minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan KDRT* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 15.

<sup>23</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan KDRT*, h. 16.

## B. Hukum Islam

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Hak isteri atas suami

Diantara hak isteri atas suami adalah:

##### 1) Mahar:

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan seorang calon suami kepada calon isterinya dalam bentuk apapun baik berupa uang maupun barang (harta benda). Kuantitas mahar tidak ditentukan oleh syari'at Islam, hanya menurut kemampuan suami yang disertai kerelaan dari sang isteri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan status sosial ekonomi masyarakat.<sup>24</sup>

##### 2) Nafkah

Para ulama' sependapat bahwa diantara hak isteri terhadap suami adalah nafkah. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal. Nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Adapun kuantitas nafkah yang diberikan suami kepada isterinya adalah sesuai kemampuan suami.

Allah S.W.T berfirman dalam Q.S At-Thalaq/: 6

وَجِدْأَمْ مِنْ سَكَنْتُمْ حَيْثُ مِنْ أَسْكِنُوهُنَّ

Terjemahnya:

*"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".<sup>12</sup>*

---

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (cet, 1; Bandung : Sinar baru,,t.th), h. 365.



### 3) Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik

Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya. Bergaul dengan baik berarti menjadikan suasana pergaulan selalu indah dan selalu diwarnai dengan kegembiraan yang timbul dari hati kehati sehingga keseimbangan rumah tangga tetap terjaga dan terkendali.

#### b. Hak suami atas isteri

Adapun diantara hak suami atas isteri adalah sebagai berikut:

##### 1) Suami ditaati oleh isteri

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaan tidak disenangi oleh suaminya. Istri hendaknya taat kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan berumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut dalam Q.S An-Nisa'/4: 34

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Terjemahnya:

*”...Sebab itu maka wanita yang shalihah adalah wanita yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara”<sup>25</sup>*

Yang dimaksud taat dalam ayat ini ialah patuh kepada Allah SWT dan kepada suaminya. Perkataan “taat” bisanya hanya digunakan oleh Allah.

<sup>25</sup>.Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Cv. Al-Waah, 1993), h.123.

Tetapi dalam ayat ini digunakan untuk suami juga, hal ini menggambarkan bagaimana sikap isteri yang baik terhadap suaminya. Allah menerangkan isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah memelihara isterinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami isteri.

Yang dimaksud menjaga dirinya di belakang suaminya adalah menjaga dirinya diwaktu suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri atau harta bendanya. Seorang isteri harus mentaati serta berbakti dan mengikuti segala yang diminta dan dikehendaki suaminya asalkan tidak merupakan suatu hal yang berupa kemaksiyatan.

- 3) Isteri tidak memasukkan orang yang dibenci oleh suaminya kedalam
- 4) rumahnya kecuali dengan izin suaminya, isteri wajib memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, terutama apabila suami bepergian, jangan sekali-kali isteri melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kecurgaan suami, sehingga suami tidak merasa tenteram pikirannya dalam bepergian. Melakukan perbuatan terlarang tidak hanya akan menghancurkan rumah tangga tetapi juga akan mendapat siksa yang sangat berat dari Allah.

c. Hak bersama suami isteri

Diantara hak bersama suami dengan isteri adalah antara lain sebagai berikut:

1) Halalnya pergaulan

Suami-isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-isteri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling memerlukan. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

2) Hak saling memperoleh harta waris

Sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang sah bila salah seorang meninggal dunia, suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan mencukupi nafkah serta keperluan hidup isterinya maka bila Istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka, sang suami berhak mendapatkan harta warisan. Demikian pula isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-duka hidup berumah tangga dan berkorban membantu suaminya, maka adillah kiranya bila isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya.

### 3) Hak timbal balik

Dalam kehidupan rumah tangga, salah satu kriteria ideal untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah adalah suami sebagai pemimpin bagi keluarganya memimpin istrinya untuk mendidik dan memperlakukan isterinya secara proporsional sebagai perintah syari'at bahwa Allah S.W.T. telah menyebut laki-laki merupakan sosok pemimpin bagi perempuan. Sebagai pemimpin bagi isteri dan keluarganya maka suami wajib memberikan bimbingan dan pendidikan kepada isterinya dan keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan kehinaan. Sedangkan isteri sebagai seorang yang dipimpin oleh suaminya hendaklah taat dan patuh terhadap perintah suaminya (selama perintah suaminya tidak dalam hal kemaksiyatan), isteri hendaknya mengerjakan perintah suami dengan sabar dan tenang.<sup>26</sup>

Demikian timbal-balik antara suami-isteri dalam memperoleh haknya masing-masing secara proporsional yang tidak merugikan kedua belah pihak.

---

<sup>26</sup> Rs. Abdul Azis, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* (Cet, 1; Semarang: CV. Wicaksana, 1990), h. 27.

Inilah kriteria ideal sebagai simbiosis mutualisme (hubungan ketergantungan yang saling menguntungkan) dalam rumah tangga.

## 2. Bentuk-Bentuk Pemaksaan Seksual Dalam Hukum Perkawinan Islam

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa statement Al-Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam QS. al-Baqarah/2: 187 yaitu:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu . mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (istri-istrimu).<sup>27</sup>*

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiyaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya ini wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.<sup>28</sup> Ulama Mazhab memandang 'azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat mazhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 5.

<sup>28</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997), h. 113.

Hambali sepakat bahwa azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri.

Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan consensus, tidak atas dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.

Dalam hal ini, biasanya yang dibuat rujukan adalah dalam QS. An-Nisaa/4: 34.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

*“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan tinggalkanlah mereka ditempat pembaringan dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”.*<sup>29</sup>

Sudah menjadi harapan setiap pasangan suami istri untuk hidup sejahtera bersama selamanya tanpa menemui hambatan-hambatan hidup dan perselisihan dalam keluarga. Oleh karena itu untuk mencapai keluarga sejahtera yang di idamkan

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 123.

oleh setiap keluarga yang dalam ajaran islam dikenal dengan keluarga sakinah yang penuh mawaddah wa rahmah (kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang).

Paling tidak “keluarga sejahtera” adalah keluarga dimana setiap anggotanya memahami secara sadar hak dan dan tanggung jawabnya masing-masing. Hak dan kewajiban seorang istri atau suami terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yang harus dilaksanakan secara sadar dan seimbang. Misalnya peranan istri untuk menciptakan ketenangan, ketentraman, kasih sayang dalam rumah tangga, harus di imbangi dengan peran suami dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga sesuai petunjuk agama. Namun bagaimana istri melakukan nusyuz? Apabila istri yang melakukan nusyuz ,suami bisa menasehati, menjauhkan di tempat tidurnya dan bahkan memukulnya seperti dalam ayat di atas surah An-Nisa: 34

Ada 2 kata kunci dalam terjemahan ayat tersebut yang dipandang melegitimasi laki-laki diatas perempuan. Kedua kata itu adalah nusyuz, dan pukullah sebagai terjemahan dari kata-kata *nusyuz* (tidak mentaati suami) dan *wadhribunna* (pukullah).

Dalam Tafsir Al Misbah. Firmannya: (وَأَهْجُرُوهُنَّ) *wahjuruhunna* yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka* adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami dari kata hajar, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ketempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Jelasnya kata ini digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu, tetapi disamping itu ia juga mengandung dua hal lain. Yang pertama bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu buruk

atau tidak disenangi, dan kedua yang ia tinggalkan untuk menuju ke tempat dari keadaan yang lebih baik.

Jika demikian, melalui perintah ini, suami dituntut untuk melakukan 2 hal pula. Pertama, menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk yang telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah *nuzyus* dan kedua, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Kata (وَأَصْرِبُوهُنَّ) *wadribuhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan kasar dan keras. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh Al-Quran *yadribuna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti *memukul di bumi*. Karena itu, perintah diatas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.<sup>30</sup>

Menurut Tafsir Al Misbah dalam ayat tersebut memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkan. Petunjuk Allah itu adalah: *wanita-wanita yang kamu khawatirkan*, yakni sebelum terjadi *nuzyus* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang di anugrahan Allah kepada para kamu wahai para suami *maka nasehatilah mereka*, pada saat yang tepat dengan kata-kata yang meyeentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila

---

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 430

nasehat belum mengakhiri pembangkannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan keluar dari rumah tetapi *ditempat pembaringan* kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka, jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu *maka pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas. *Lalu jika mereka telah menaati kamu*, baik sejak awal nasehat atau setelah meninggalkannya ditempat tidur, atau saat memukulnya, *maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka*, dengan menyebut atau mengecam lagi pembangkannya yang lalu. Tetapi tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. *Sesungguhnya Allah* sejak dahulu hingga kini *Maha Tinggi lagi Maha Besar*. Karena itu merendahkan kepada Allah dengan mentaati perintahnya dan jangan merasa angkuh membangkang bila perintah itu datang dari Allah.<sup>31</sup>

Sejalan dengan tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah Ta'ala: {تَخَافُونَ سُوءَ ظَنِّهِ} “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya” yaitu, wanita-wanita yang kalian khawatirkan *nusyuz-nya* kepada suami mereka. *An-Nusyus* adalah merasa paling tinggi diatas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja *nusyus* itu timbul maka nasehatilah dan takut-takuti dia dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya.

Dari Abu Hurairah , ia berkata:” Rasulullah Bersabda:

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 423



وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُهَاسِنٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَاحِدٍ الْأَشْجَعُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْفُطَيْلَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلَ أَمَرَ أَنْ يَأْتِيهِ فَلَمْ يَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبًا نَ عَلَيْهِمَا لَهَنَّتْهَا لَمَلٌ يَكُونُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya:

*“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abu Sa’id Al Asyaj telah menceritakan kepada kami waki. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami jarir semuanya dari Al A’masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah saw bersabda: jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami hingga malam itu suaminya marah, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi” (HR. Muslim)*

*“Sedangkan firman Allah: {وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي لَمَضَاجِعٍ}” Dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka”. Ali Bin Abi Thallah menceritakan dari Ibnu ‘Abbas:” Al-Hajru Yaitu tidak menjima’ (menyetubuhi) dan tidak tidur dengan dia diatas pembaringannya, serta berupaya membelakanginya.” Yaitu hendaklah ia nasehati, jika ia terima. Jika tidak, hendaklah ia pisahkan tempat tidurnya dan tidak berbicara dengannya tanpa terjadi perceraian. Dan hal tersebut sudah pasti memberatkannya.*

Firmannya {وَأَضْرِبُوهُنَّ} “pukullah mereka” Yaitu jika nasehat dan pemisahan

tempat tidur tidak menggertaknya, maka kalian boleh memukulnya dengan tidak melukai.

Firman Allah: {فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} “jika mereka mentaatimu

*maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*”. Yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya.

Firmannya : {إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ} “*Sesungguhnya Allah Maha tinggi*

*lagi Maha Besar*” hal ini adalah ancaman buat laki-laki, jika mereka berbuat zalim kepada para istri tanpa sebab, maka Alla Mah Tinggi lagi Maha Besar, Allah yang akan menjaga mereka dan Allah yang akan menghukum orang yang berbuat dzalim kepada mereka.<sup>32</sup>

Dari teks al- Qur'an dan hadis di atas kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memiliki hak sedikitpun dalam hal tersebut. Dan hadis diataslah yang sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubungan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan.

Ayat diatas sering salah diartikan dan salah digunakan padahal Allah tidak mensyariatkan sesuatu jika didalamnya terdapat maslahat bagi hamba-hambanya, dan inilah yang seharusnya diyakini oleh setiap muslim dengan sepenuh hati. Karena pada kata “memukul” dalam ayat diatas, yang dimaksud bukanlah makna harfiyahnya yang berarti penganiyaan dan kekerasan fisik. Akan tetapi, yang dimaksud adalah yakni dalam pengertian mendidik atau memberi pelajaran, yang perlu digaris bawahi

---

<sup>32</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir ( Jakarta: Pustaka Imam Asy' Syafi'I, 2009), h. 73-75.

adalah meski sebagian besar ulama dan ahli tafsir mengartikan kata “memukul” dalam pengertian fisik, hal itu hanya boleh dilakukan dalam kondisi yang amat terpaksa, yang sifatnya hanyalah darurat dan sama sekali bukanlah anjuran apalagi kewajiban.

Pernikahan tidak luput dari kesalahpahaman. Jika kesalahpahaman tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pasangan suami istri. Pada ayat tersebut jangan dilihat sebelah mata, namun harus dipahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara suami istri dalam masyarakat. Karena itu, berlaku kasar terhadap istri, seperti memukul atau menampar dan sebagainya, sangat bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 diatas, Allah menjelaskan tentang kedudukan suami, sebagai pemimpin keluarga dan juga menjelaskan tentang kewajiban istri untuk mentaati suaminya, jika ternyata dalam realita terjadi *nuzyus* dari pihak istri terhadap suaminya, tidak mengidahkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, maka Islam mengajarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh suami sebagai pemimpin keluarga agar istrinya kembali kejalan yang benar.

Adapun pemukulan yang dimaksudkan dalam ayat diatas yaitu pemukulan dengan tujuan untuk menyadarkan istrinya dari sikap *nuzyusnya* dan pemukulan ini tidak meninggalkan bekas sedikitpun.

Dengan demikian, dalam memahami persoalan *nuzyus*, hal yang harus dipertimbangkan yaitu: *Pertama*, prinsip keadilan, kita yakini al-Qur'an selalu dalam posisi yang adil dalam mengemukakan persoalan, artinya ketika istri melakukan *nuzyus* kita sebagai suami harus jeli melihat apa sebabnya, jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan prinsip keadilan dalam melihat *nuzyus* adalah prinsip ketika istri *nuzyus* tidak hanya dipahami pada sisi ketidaktaatan istri tetapi harus dipahami secara

menyeluruh misalnya bagaimana perlakuan suami terhadap istrinya, apakah hak-hak istri telah dipenuhi suami atau belum. *Kedua*, prinsip *Muasyarah bil ma'ruf* ini pada dasarnya adalah prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami istri, suami maupun istri masing-masing harus saling mempergauli dengan baik. Apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan kecil kemungkinan akan terjadinya nuzyus.

### 3. *Hukuman Pelaku Pemaksaan Seksual*

Dalam hukum pidana islam dikenal 4 kelompok pembedaan yaitu, *qisas*, *diyat*, *hudud* dan *ta'zir*. Qisas dan diyat (uang tebusan atau darah) adalah pembedaan atas kejahatan terhadap nyawa dan badan, bahwa seseorang yang terbukti membunuh atau melukai tanpa alasan, maka dipidana mati/luka atau membayar tebusan atas nyawa/luka dengan sejumlah besar uang. Adapun hudud adalah pidana islam yang mencakup 6 hal yaitu: pidana bagi pezina, orang yang menuduh orang baik-baik berzina, pencuri, peminum atau pengguna kahamr, perampok, dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas terpidana berdasarkan pertimbangan hakim.

Kekerasan Seksual yang meliputi memaksa istri bersetubuh dengan cara yang diharamkan agama ( kekerasan seksual seperti ini meliputi memaksa istri bersetubuh disaat puasa wajib, istri sedang haid, dan bersetubuh dengan cara yang tidak wajar seperti mendtangi istri pada jalan belakang lewat dubur). Adapun sanksi hukum bagi pelaku adalah ta'zir , jika pelaku (suami) tidak berhenti maka patut diceraikan dengan alasan demikian dan jika istri ridha (rela atau menerima dengan senang hati), maka ia berdosa.<sup>33</sup> Sementara bagi suami yang memaksa istrinya untuk berhubungan seksual

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: khitbah, Nikah, dan Talak* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), h.237.

dengan orang lain, hal ini merupakan zina, namun karena istri berada dalam paksaan, maka tidak dikenakan sanksi pidana.<sup>34</sup>

Namun paksaan disini harus memenuhi syarat-syarat paksaan, seperti ancaman yang menyertai paksaan berat, apa yang diancamkan seketika adalah seketika yang mesti terjadi, orang yang memaksa mempunyai kesanggupan untuk melaksanakan ancamannya, pada orang yang menghadapi paksaan timbul dengan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi, serta perkara yang diancamkan adalah perkara yang dilarang. Dalam posisi seperti ini istri tidak dikenakan sanksi pidana, adapun suami yang melakukan paksaan tersebut adalah turut berbuat tidak langsung terhadap tindak pidana zina. Dalam konteks ini, dalam hukum pidana islam suami dikenai hukuman ta'zir yakni perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim)/pertimbangan hakim dipengadilan untuk mencegah hal yang sama terjadi.<sup>35</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

---

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 353.

<sup>35</sup> M.Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, h. 249.

## BAB IV

### **Analisis Perbandingan Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri ( Telaah UU No.23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)**

Dapat dipahami bahwa antara UU No. 23 Tahun 2004 dan hukum islam terdapat beberapa perbedaan di antaranya adalah:

#### **A. Dari Segi Bentuk**

*Azl* dengan *marital rape* itu berbeda. *Azl* adalah mengeluarkan sperma diluar vagina istri. Jadi, pada mulanya suami istri melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi, pada saat sperma ingin keluar, suami tidak mengeluarkan dalam ovum. Suami mengeluarkan sperma diluar vagina istri. Akibatnya, istri tidak merasakan kenikmatan saat berhubungan. Menurut pendapat para ulama, *azl* termasuk salah satu bentuk pemaksaan hubungan seksual. Sedangkan *marital rape* adalah melakukan pemerkosaan atau kekerasan yang dilakukan suami kepada istri untuk melakukan hubungan seksual.<sup>1</sup> Pada mulanya istri tidak mau atau tidak siap melayani hubungan seksual dengan suaminya. Akan tetapi, suami memaksa dan tidak mau mengerti.

Menurut UU No. 23 tahun 2004, *marital rape* termasuk bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dan *azl* termasuk bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam hukum Islam.

Menurut hukum islam melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau *marital rape*. *Marital rape* bertentangan dengan prinsip-prinsip islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Terkait dengan soal

---

<sup>1</sup> Milda Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Isteri* (Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 11-12.

relasi suami istri, islam setidaknya menggariskan 2 prinsip ajaran yaitu persamaan hak suami istri dan relasi yang baik.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku orang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, verbal maupun nonverbal yang menimbulkan efek negative secara fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi dan juga kekerasan seksual. Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dialami laki-laki maupun perempuan. Kekerasan seksual bisa dilakukan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya. Akan tetapi, pada umumnya terjadi dengan pelaku laki-laki dan korban perempuan.

Didalam hukum Islam salah satu unsur penting dalam penetapan hukum adalah *maqasid asy-syariah* . prinsip *maqasid asy-syariah* (perlindungan masalah primer, kepentingan umum dan hak-hak dasar manusia), dan *muasyarah bil ma'ruf* (relasi suami istri yang baik dan patut) sebagaimana yang diajarkan dalam hukum islam.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya seorang suami itu tidak boleh memaksakan kehendak istrinya, khususnya terkait perkara seksualitas. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekadar objek pemenuhan nafsu seks. Dan ini adalah tindak pidana pemerkosaan, yakni pemerkosaan dalam perkawinan.

## **B. Dari Segi Sanksi**

Kekerasan seksual suami terhadap istri dalam perkawinan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun persoalan ini jarang sekali diselesaikan secara hukum, bahkan dibahas secara terbuka. Mungkin dikarenakan perangkat hukumnya belum

---

<sup>2</sup> Andi Syahraeni, *Bimbingan keluarga Sakinah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 152.

memadai dan kurangnya perhatian dari yang berwenang. Kenyataan itu didukung pula budaya yang masih menganggap sepele menceritakan aib rumah tangga dan korbannya dalam hal ini istri lebih memilih diam dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.

Menurut UU No. 23 tahun 2004, suami yang memukul istrinya mutlak dikategorikan sebagai kekerasan fisik. Sedangkan menurut perkawinan Islam suami yang memberi pelajaran kepada istrinya yang nuzys tanpa menyakitinya setelah diberi nasehat dan pisah tempat tidur, bukan dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Asumsi tersebut berdasarkan QS. An-Nisa/4: 34.

Dalam hukum perkawinan Islam tidak dibenarkan istri melaporkan suaminya secara pidana dengan alasan suami memperkosanya (memaksa berhubungan seksual). Menurut Islam pemerkosaan dalam hal ini yaitu pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istrinya hanya terjadi diluar ikatan perkawinan. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang menginformasikan adanya kutukan malaikat kepada istri yang menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan biologis.

Bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan rumah tangga juga berbeda, menurut UU No. 23 tahun 2004 bab 8 pasal 44, pelaku kekerasan fisik dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda. Sementara apabila korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemaksaan hubungan seksual mengakibatkan kematian, maka sesuai Pasal 46: “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 56.000.000 (Lima puluh enam juta rupiah).<sup>3</sup> Sedangkan dalam pidana Islam yang relevan untuk

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.15.



diterapkan adalah *qishas* dan *diyat* (uang tebusan atau darah) adalah pemidanaan atas kejahatan terhadap nyawa dan badan, bahwa seseorang yang terbukti membunuh atau melukai tanpa alasan, maka dipidana mati/luka atau membayar tebusan atas nyawa/luka dengan sejumlah besar uang karena menyangkut kezaliman, yaitu kejahatan fisik terhadap orang lain, hanya saja dalam khazanah hukum islam, baik dalam al-Quran dan hadis maupun praktek masyarakat islam pada masa awal dan seterusnya, tidak pernah ditemukan satu kasuspun diterapkan kepada suami zalim yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau sebaliknya. Kalaupun terjadi kasus kekerasan fisik, maka solusi hukum islam hanya sebatas membolehkan perceraian setelah upaya penggunaan jasa hakim yang bertugas memediasi suami dan istri yang berselisih tidak berhasil (ta'zir).

Berdasarkan penelitian bahwa islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Istilah perkosaan terhadap istri merupakan istilah baru yang belum dikenal luas oleh masyarakat, sebab selama ini pengertian perkosaan lebih dikhususkan pada perkosaan terhadap perempuan yang terjadi diluar perkawinan. Pandangan masyarakat selama ini, apabila seseorang telah menjadi suami istri, maka seorang suami memiliki hak penuh atas istrinya, termasuk kepemilikan penuh atas organ reproduksi perempuan. Reproduksi merupakan salah satu karakteristik makhluk hidup. Reproduksi manusia diawali dengan pertemuan sperma dan ovum dalam sebuah aktivitas persetubuhan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga, tidak hanya suami yang membutuhkan seks, istripun tidak bisa membunuh naluri dasarnya tersebut. Pandangan demikian banyak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap teks-teks alquran dan hadis nabi yang terkait dengan persoalan relasi suami istri. Selain itu, pengertian perkawinan yang di

ungkapkan oleh sebagian ahli fiqh adalah sebagai ‘aqd tamlik (hak kepemilikan) telah menempatkan seorang suami sebagai pemilik penuh terhadap perempuan yang menjadi istrinya.

Adapun persamaan antara undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukum islam adalah bahwa di antara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri. Ini dilakukan dalam rangka menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban suami istri demi terwujudnya sebuah rumah tangga *sakinah* yang didasarkan pada *mawadah* dan *rahmah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Menurut UU No.23 tahun 2004, menurut undang-undang tersebut seorang istri boleh untuk melakukan penolakan terhadap ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual dengannya, karena istri dalam hal ini memiliki kedudukan yang sama dengan suaminya dalam rumah tangga. Karena seks juga adalah hak istri, hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama dengan penindasan. Hanya satu pihak saja yang bisa menikmati, sebab istri tidak menginginkan hubungan itu dan ia tidak akan terangsang dan terpuaskan, malah bisa tersakiti secara fisik dan psikis. Dan pada ketentuan pasal 5 undang-undang PKDRT menegaskan bahwa: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c.kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.* Dan pada pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
2. Menurut hukum Islam seorang suami boleh melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap istrinya, dalam hal istri sedang dalam keadaan sehat dan suci dari haid serta sesuai dengan tujuan perkawinan. Apabila

istri menolak untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya, maka dianggap *nusyus*, karena tidak mematuhi perintah suami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Terkait masalah ini didalam hukum Islam terdapat aturan-aturan yang mengharamkan hubungan seksual meskipun antara suami istri. Yakni keadaan dimana suami memaksa istri untuk berhubungan seksual, sementara istri sedang haid, dan tidak sehat. Dalam hubungan seksual harus didasarkan pada prinsip *mu'asyarah bil al ma'ruf*, karena apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan kecil kemungkinan akan terjadi *nusyus*.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya meningkatkan pemahaman dan penafsiran terhadap teks Al Qur'an dan hadis supaya tidak terjadi pemahaman teks keagamaan yang bias gender .
2. Dengan adanya pembentukan peraturan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjadi sebuah penghargaan dan penghormatan terhadap kaum perempuan sehingga mereka tidak menjadi korban dalam rumah tangga khususnya terhadap kekerasan seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahannya.*

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amin, Qasim, *The New Women*, Ter. Syariful Alam, “Sejarah Penindasan Perempuan; Menggugat Islam Laki-Laki, Menggugat Islam Perempuan”. Yogyakarta:2003.

Aisyah, Siti. *Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: 2001.

Badri, R. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*. Surabaya: CV.Amin, 1985.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Cet, I; Yogyakarta: LKiS, 2005.

Hatout, Hasan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hayati, Eli Nur. *Kekerasan Seksual*, dalam Irwan Martua Hidayana, *Seksualitas: Teori dan Realitas* .Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004.

Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam. *Fatwa An-Nisa*. Jakarta: Ailah, 2005.

*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Departemen Agama RI; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Insani, 2004.

Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah, Abu ‘Isa. *Sunnah at-Turmidzi*. Beirut : Dar al Fikr, 1994.

Muhammad bin Abu Abdullah bin Idris Asy Syafi’I. *Mukhtashar kitab al-Umm fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Amiruddin, dengan judul ringkasan kitab all-Umm. Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Marlia, Mirla. *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Isteri*. Yogyakarta; Pustaka Pesantren, 2007.

- Masyhuri dan M. Zainuddin. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muqsit Ghozali Abdul, dkk. *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*. Cet.I; Jakarta: Rahima, 2002.
- Maloko, M.Tahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Munti, Ratna Batari. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Cet. I; Lembaga Kajian Agama dan Gender; Jakarta: 1999.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Puspasari, Aulia, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, t.p., 2009.
- Pusat Kajian Wanita dan Gender UI. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shaleh, Abdul Rahman, Dkk. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI, 2007.
- Sukarna, Uma. *Metode Analisis Data*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Siti, Musdah Mulia. *Muslimah Reformasi: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Cet. I; Bandung: Penerbit Mizan, 2005.
- Syakraeni, Andi. *Bimbingan keluarga Sakinah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Samin, Sabri dan Andi Narmaya Aroeng. *FIKIH II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Thobroni M dan Aliyah A. Munir. *Meraih berkah dengan menikah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. No. 23 Th. 2004 tentang Penghapusan KDRT* . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wajidi, Farid dan Cicit Farkha Assegaf. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.



## RIWAYAT HIDUP



**Ratu Faisa**, dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 9 Juli 1994. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan buah cinta dari pernikahan Sirajuddin dan Hj. Fatmawati.

Penulis memulai pendidikan formal di bangku Sekolah Dasar Negeri Bantinoto pada tahun 1999 dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri 3 Takalar dan tamat tahun 2008, dan pada tahun yang sama kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Takalar.

Setelah lulus dari SMAN 1 Takalar pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri dengan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Tahun 2015 penulis mengajukan judul skripsi “Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri (Telaah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam)” guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R